

ORGANISASI KERJA SAMA ISLAM (OKI) SEBAGAI ENTITAS KOSMOPOLITAN DEMOKRATIK: ANALISIS DINAMIKA INTERNAL DAN TANTANGAN STRUKTURAL

Organization of Islamic Cooperation (OIC) as a Democratic Cosmopolitan Entity: Analysis of Internal Dynamics and Structural Challenges

Sabda Ningsih

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia
sabdaningsih@fisip.unsri.ac.id

INFO ARTIKEL Article History

Received
10 May 2025

Revised
22 June 2025

Accepted
5 July 2025

Keywords:
democratic
cosmopolitanism; global
institutions; Islamic
world; OIC.

Kata Kunci:
demokrasi;
kosmopolitanisme
demokratis; lembaga-
lembaga global; dunia
Islam; OKI.

Abstract

This study analyzes the internal dynamics and structural challenges faced by the Organization of Islamic Cooperation (OIC) in realizing a democratic cosmopolitan entity, addressing a literature gap regarding its democratic practices. Employing the concept of democratic cosmopolitanism with indicators of inter-state equality, cultural hybridity, and individual Human Rights (HR) implementation, this qualitative descriptive-analytical research utilizes document analysis. Findings reveal that the OIC grapples with inter-state inequality due to political hegemony, and while efforts for cultural hybridity exist, internal sectarian diversity remains largely unintegrated. Individual HR implementation is selective, with political participation often restricted despite some progress in social and cultural HR. In conclusion, the OIC demonstrates selectivity in adopting democratic elements, showing cautious openness in economic democracy and certain social/cultural HR issues; however, dominant internal political dynamics and structural challenges, particularly hegemony and unresolved cultural issues, position the OIC far from being a fully democratic cosmopolitan entity.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dinamika internal dan tantangan struktural yang dihadapi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam upaya mewujudkan entitas kosmopolitan demokratik, didasari oleh celah literatur mengenai praktik demokrasinya. Menggunakan konsep kosmopolitanisme demokrasi dengan indikator kesetaraan antar-negara, hibrida budaya, dan pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) individu, penelitian kualitatif deskriptif-analitis ini mengandalkan analisis dokumen. Hasilnya menunjukkan bahwa OKI bergulat dengan ketidaksetaraan antar-negara akibat hegemoni politik; meskipun upaya hibrida budaya ada, keragaman sektarian internal belum sepenuhnya terintegrasi. Pelaksanaan HAM individu bersifat selektif, dengan pembatasan partisipasi politik, meskipun potensi demokrasi ekonomi terlihat dari fasilitasi kerja sama. Disimpulkan bahwa dalam pemerintahan multi-level seperti OKI, terdapat seleksi dalam adopsi unsur demokrasi, di mana keterbukaan hati-hati pada demokrasi ekonomi serta isu sosial dan budaya terkait HAM terlihat, namun dinamika politik internal dan tantangan struktural yang dominan (hegemoni, isu budaya) menjadikan OKI masih jauh dari status entitas kosmopolitan demokratik sepenuhnya.



PENDAHULUAN

Di tengah kompleksitas tata kelola global, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) berdiri sebagai salah satu aktor paling signifikan. Dibentuk oleh negara-negara mayoritas Muslim dari empat benua, OKI bukan sekadar organisasi internasional terbesar kedua setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB); ia adalah cerminan identitas kolektif 57 anggotanya, dengan misi luhur menjaga perdamaian internasional. Namun, OKI memiliki kekhasan: interpretasi perdamaianya selaras dengan pandangan Islam, memprioritaskan resolusi konflik di antara negara-negara Muslim. Lebih dari itu, OKI mengemban amanah untuk meluruskan kesalahpahaman terhadap dunia Muslim dan menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap umat Islam, sambil mendorong pembangunan yang dilandasi prinsip Islam di berbagai sektor, dari pendidikan hingga ekonomi.

Sebagai institusi yang mewakili Islam global, OKI memikul tanggung jawab besar terhadap citra dan masa depan umat. Namun, di era globalisasi ini, ada pertanyaan mendesak yang muncul: bagaimana OKI, sebagai aktor internasional, mengimplementasikan praktik demokrasi? Mengutip McGrew (2020), globalisasi telah

merekonstruksi infrastruktur komunikasi global, mendorong masyarakat sipil untuk memiliki pemikiran seragam mengenai tata pemerintahan global, salah satunya adalah penegakan demokrasi. Ini berarti, di mata masyarakat global, institusi internasional diharapkan menjadi teladan demokrasi. Oleh karena itu, kemampuan OKI dalam mempraktikkan demokrasi akan menjadi sorotan utama, memengaruhi legitimasi dan relevansinya di panggung dunia.

Perhatian global terhadap OKI ini tercermin dari beragam penelitian yang mengkaji keterbukaan OKI, baik di bidang politik maupun ekonomi. Namun, ketika penelitian ini menyelami praktik demokrasi politik di dalam OKI, sebuah teka-teki muncul. Beberapa pengamat, seperti Akbarzadeh dan Ahmed (2018), meragukan praktik demokrasi ini, menunjuk pada hegemoni kuat Arab Saudi yang mengendalikan struktur dan hubungan bilateral, bahkan memanfaatkan OKI untuk kepentingan nasionalnya. Hal ini mengindikasikan adanya dominasi kekuatan tunggal yang berpotensi mematikan suara anggota lain. Di sisi lain, Yogatama dan Hastiadi (2015) menyajikan pandangan kontras, bahwa *the new OIC Charter* (2008) adalah bukti reformasi demokrasi dan

institusional OKI dalam mempromosikan kerja sama ekonomi dan perdagangan antaranggota. Kontradiksi temuan ini menciptakan celah signifikan: apakah OKI benar-benar telah bertransformasi menjadi institusi yang demokratis, terutama dari perspektif politik?

Dilema serupa juga terlihat pada sisi demokrasi dalam kegiatan ekonomi. Penelitian Samargandi dan rekan (2020) mengamati peningkatan signifikan kualitas kelembagaan yang lebih transparan dan multilateral di bidang sosial dan ekonomi (1984-2016). Chen dan Yu (2021) juga menemukan keterbukaan negara anggota OKI terhadap kerja sama ekonomi dengan perusahaan asing, meski lebih dominan pada negara yang kurang religius. Namun, penelitian terbaru Chen dan Yu (2023) justru menemukan hambatan likuiditas akibat sistem perbankan syariah, memengaruhi akses keuangan. Lebih lanjut, Ali dan rekan (2022) menemukan kemajuan positif dalam transparansi dan keterbukaan ekonomi OKI, namun partisipasi negara berpenghasilan rendah masih belum maksimal. Secara keseluruhan, studi-studi ini mengungkapkan peluang sekaligus hambatan: otoritas OKI masih dipegang negara-negara yang ketat secara agama (Samargandi et al., 2020; Chen dan Yu, 2021, 2023), dan negara

berpenghasilan tinggi cenderung mendominasi manfaat dari keterbukaan ekonomi (Ali et al., 2022).

Berdasarkan temuan-temuan yang kontradiktif mengenai praktik demokrasi OKI—baik secara politik maupun ekonomi—penelitian ini berupaya menganalisis secara mendalam dinamika internal dan tantangan struktural yang dihadapi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam konteks entitas kosmopolitan demokratik. Untuk menjawab pertanyaan ini, penelitian ini mengadopsi dan mengembangkan konsep kosmopolitanisme demokratik, melanjutkan studi Pausch (2021) tentang Uni Eropa. Dalam konteks ini, kosmopolitanisme demokratik dimaknai sebagai institusi multi-level yang tidak hanya terbuka terhadap isu-isu global dan partisipasi setara dari berbagai aktor, tetapi juga mampu mengikis hegemoni tunggal dan mendorong hibrida budaya yang inklusif. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis sejauh mana OKI telah memanifestasikan karakteristik kosmopolitan demokratik. Penulis berargumen bahwa OKI baru memunculkan unsur praktik demokrasi, seperti keterbukaan pada isu sosial kaum Muslim dan kesetaraan dalam partisipasi kegiatan. Namun, hegemoni tunggal (terutama pengaruh Arab

Saudi) dan isu hibrida budaya masih menjadi masalah utama, sehingga OKI masih jauh untuk mencapai status entitas kosmopolitan demokratik. Signifikansi penelitian ini terletak pada dua aspek: secara teoretis, ini menjadi kritik terhadap konsep kosmopolitan demokratik dalam konteks pemerintahan multi-level, menunjukkan bahwa realitas kekuasaan dan kepentingan nasional masih sangat dominan pada level internasional; secara praktis, pemahaman mendalam tentang dinamika demokrasi OKI dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan di OKI dan negara anggotanya, guna merumuskan strategi reformasi internal yang lebih efektif untuk meningkatkan legitimasi, akuntabilitas, dan inklusivitas OKI di panggung global.

KERANGKA ANALISIS

Kosmopolitanisme Demokrasi dalam Organisasi Regional

Konsep kosmopolitanisme demokrasi menjadi krusial dalam memahami transformasi komunitas politik kontemporer dan perbaikan tata pemerintahan global. Delanty (2014) berargumen bahwa kondisi saat ini menuntut kerangka transformasi komunitas politik yang mampu bersaing, mendukung gagasan keadilan global melalui

kosmopolitanisme. Sejalan dengan itu, McGrew (2020) melihat kebutuhan ide normatif untuk memperbaiki penyimpangan politik global dengan menciptakan kosmopolitanisme demokrasi. Archibugi (2004) menjelaskan kosmopolitanisme demokrasi sebagai sebuah konseptualisasi proses menuju keadilan global (Delanty, 2011), sementara McGrew (2020) mendefinisikannya sebagai pendekatan yang menggabungkan demokrasi dalam tata pemerintahan global dengan keadilan sosial global. Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, penelitian ini memformulasikan kosmopolitanisme demokrasi sebagai kerangka kerja yang menganalisis kemampuan sebuah organisasi multi-level untuk menginternalisasi prinsip-prinsip demokrasi universal, mempromosikan kesetaraan partisipasi, mengelola keberagaman budaya, dan menjamin hak-hak dasar individu, demi tercapainya keadilan global.

Untuk menganalisis Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sebagai entitas kosmopolitan demokratik, formulasi ini diturunkan menjadi tiga indikator kunci: (1) Kesetaraan antar-negara, (2) Hibrida Budaya, dan (3) Pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM). Pemilihan indikator ini didasarkan

pada dimensi fundamental kosmopolitanisme demokrasi: prinsip keadilan dan partisipasi setara dalam tata kelola global, kemampuan mengelola pluralisme identitas, serta komitmen terhadap nilai-nilai universal yang melindungi individu.

Kesetaraan Antarnegara

Para pendukung kosmopolitanisme demokrasi berpendapat bahwa akuntabilitas praktik demokrasi tidak lagi hanya berada di tingkat negara (Heywood, 2014). Pandangan ini mendorong perluasan demokrasi ke dalam sistem pemerintahan multi-level yang melibatkan badan supra-negara, institusi negara, dan organisasi regional yang saling berinteraksi tanpa adanya otoritas tunggal yang mendominasi. Kosmopolitanisme demokrasi melembagakan nilai-nilai demokrasi seperti hukum, kesetaraan politik, pemerintahan yang berpihak pada rakyat, keadilan sosial, solidaritas, dan pemanfaatan ekonomi untuk rakyat ke dalam tata kelola global (McGrew, 2020). Revolusi ini memperluas jangkauan demokrasi dari lingkup negara ke hubungan lintas negara.

Heywood (2014) menekankan bahwa kosmopolitanisme demokrasi menyasar institusi global dengan meningkatkan partisipasi anggota, yang selama ini menjadi kekurangan dalam sistem pemerintahan

global. Menurutnya, dalam tata pemerintahan global, seluruh negara anggota—demokrasi maupun teokrasi—harus mendapatkan perlakuan yang sama dan diberikan kesempatan bagi individu atau komunitas dalam pengambilan keputusan atau perencanaan proyek. Kosmopolitanisme demokrasi tingkat global sangat terdukung oleh praktik demokrasi di tingkat regional, karena organisasi regional membantu institusi global dalam menyeleksi kepentingan berbagai aktor (negara, individu, atau kelompok identitas) di kawasannya (Archibugi, 2004). Sebaliknya, organisasi regional dapat menjadi penghambat kosmopolitanisme demokrasi global jika mereka sendiri tidak bersikap demokratis dan justru bersaing dengan pemerintah lokal atau negara dalam proses pengambilan keputusan (Held, 2009). Dalam konteks OKI, indikator kesetaraan antar-negara akan dianalisis melalui sejauh mana proses pengambilan keputusan dan distribusi manfaat di OKI mencerminkan perlakuan yang sama bagi semua negara anggota, serta seberapa efektif OKI menghindari dominasi atau hegemoni oleh satu atau beberapa negara kuat.

Hibrida Budaya

Salah satu tantangan utama dalam kosmopolitanisme demokrasi adalah manajemen partisipasi politik global oleh

individu serta pengelolaan keberagaman budaya yang dibawa oleh masing-masing aktor. Bagi kelompok identitas, kosmopolitanisme dihadapkan pada potensi benturan budaya. Oleh karena itu, kosmopolitanisme demokrasi seharusnya berfungsi sebagai wadah mediasi bagi berbagai kepentingan budaya (Delanty, 2011). Pada tingkat global, mediasi yang paling potensial adalah mengarah pada hibrida budaya sebagai upaya untuk menciptakan kosmopolitanisme demokrasi. Hibrida budaya mengacu pada percampuran dan adaptasi elemen-elemen budaya yang berbeda, menghasilkan bentuk-bentuk baru yang inklusif dan saling menghargai. Dalam kerangka ini, hibrida budaya akan dieksplorasi dalam OKI dengan meninjau kemampuannya untuk mengelola dan mengakomodasi keragaman interpretasi dan praktik Islam di antara negara-negara anggotanya, serta bagaimana OKI mempromosikan dialog antar-budaya tanpa mengeliminasi identitas partikular.

Pelaksanaan Hak Asasi Manusia

Held, seperti dikutip Heywood (2014), mengkritik kekurangan kosmopolitanisme demokrasi pada masanya yang tidak merangkul keberagaman budaya dan tidak

mengkonseptualisasikan partisipasi individu dalam politik global. Untuk mengatasi hal ini, Caney (2013) memformulasikan praktik kosmopolitanisme demokrasi terkait partisipasi individu. Ia menekankan bahwa setiap individu, terlepas dari identitasnya, memiliki hak untuk berpartisipasi dalam sistem pemerintahan global, namun mereka juga harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang sistem demokrasi untuk mengembangkan kepentingannya. Caney juga menjelaskan bahwa dalam kosmopolitanisme global, individu memiliki tiga hak dasar yang harus dipenuhi dalam partisipasi politiknya: kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonomi. Dalam konteks OKI, indikator pelaksanaan Hak Asasi Manusia akan dievaluasi dari komitmen dan mekanisme institusional OKI dalam mempromosikan serta melindungi hak-hak dasar individu (seperti partisipasi sipil, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi) di negara-negara anggotanya, sejalan dengan prinsip-prinsip universal sambil menghormati kekhasan konteks Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih

untuk memungkinkan analisis mendalam terhadap dinamika internal dan tantangan struktural Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sebagai entitas kosmopolitan demokratik, serta mendokumentasikan dinamika kausal di dalamnya (Neuman, 2014).

Teknik pengumpulan data utama adalah analisis dokumen (studi kepustakaan). Data diperoleh dari berbagai bukti tertulis yang relevan dan kemudian diintegrasikan menjadi data deskriptif yang komprehensif (Neuman, 2014). Dokumen yang akan dianalisis meliputi, namun tidak terbatas pada: Laporan resmi dan dokumen kebijakan OKI (misalnya, *OIC Charter*, resolusi pertemuan puncak, laporan komite, pernyataan resmi terkait isu-isu politik, sosial, ekonomi, dan HAM) dari periode 10 tahun terakhir untuk mengidentifikasi praktik kesetaraan antar-negara, upaya hibrida budaya, dan komitmen terhadap HAM. Publikasi ilmiah dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik OKI, demokrasi dalam organisasi regional, kosmopolitanisme, serta isu-isu politik, ekonomi, sosial, dan hak asasi manusia di negara-negara anggota OKI.

Teknik analisis data terdiri dari tiga tahap utama, mengacu pada Neuman (2014) dan disesuaikan dengan kerangka analisis

penelitian ini. Tahap konseptualisasi melibatkan penghubungan data mentah yang terkumpul dengan konsep-konsep kunci dan permasalahan penelitian. Pada tahap pengkodean data, data mentah dari dokumen akan dimasukkan ke dalam kategori konseptual yang telah ditetapkan. Proses pengkodean akan bersifat tematik, mencari pola, tema, dan pernyataan kunci yang mendukung atau membantah keberadaan setiap indikator kosmopolitanisme demokratik di OKI.

Setelah data dikodekan dan dikategorikan, pada tahap penarikan simpulan dan diskusi, penulis melakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi pola, tren, dan anomali dalam data. Simpulan akan ditarik berdasarkan hasil analisis ini, yang secara langsung akan mengevaluasi dinamika internal dan tantangan struktural OKI dalam konteks entitas kosmopolitan demokratik berdasarkan pemenuhan ketiga indikator.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Dinamika Internal dan Tantangan Struktural OKI dalam Kosmopolitanisme Demokrasi

Bagian ini menyajikan temuan-temuan penelitian yang dianalisis menggunakan kerangka kosmopolitanisme demokrasi,

dengan fokus pada tiga indikator utama: (1) Kesetaraan Antar-Negara, (2) Hibrida Budaya, dan (3) Pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) Individu dalam konteks Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Kesetaraan Antar-Negara di OKI

Analisis terhadap partisipasi politik negara anggota OKI menunjukkan adanya tiga aliran sistem politik utama: teokrasi (diwakili Arab Saudi), *theo-democracy* (diwakili Republik Iran), dan demokrasi (diwakili Turki). Ketiga negara ini memiliki pengaruh signifikan dalam sistem kelembagaan OKI dan secara aktif berusaha memproyeksikan sistem politik nasional mereka ke dalam kultur organisasi, yang berujung pada benturan kepentingan.

Sejak 2016, Arab Saudi, sebagai negara teokrasi monarki dengan aliran Wahabi, berupaya menjadi hegemoni tunggal dan menjadikan sistem politiknya acuan bagi negara anggota. Meskipun negara teokrasi murni minoritas di OKI, negara Sunni atau Wahabi merupakan mayoritas, ditambah kekuatan finansial Arab Saudi yang menjadi pertimbangan anggota lain (Akbarzadeh & Ahmed, 2018) Upaya hegemoni ini memancing respons dari Republik Iran, negara *theo-democracy* dengan aliran Syiah.

Bagi Iran, hegemoni tunggal dinilai tidak menghormati kepentingan negara lain dan membawa masalah ideologi ke dalam organisasi. Sejak 2016, Iran juga berupaya menjadikan sistem *theo-democracy*-nya sebagai model ideal, bahkan membawa kepentingan luar negerinya melawan Israel dan Amerika Serikat yang merupakan sekutu Arab Saudi. Penolakan Iran terhadap perwalian Arab Saudi di tempat suci umat Islam pada tahun 2016 menunjukkan perlawanan ini, meskipun tidak didukung mayoritas anggota, bahkan negara *theo-democracy* lainnya. Aksi Iran dianggap memicu keretakan dalam organisasi karena konflik Syiah-Sunni.

Persaingan antara Arab Saudi dan Republik Iran tidak hanya sebatas perbedaan sistem politik, melainkan telah berkembang menjadi permainan sektarianisme Timur Tengah di OKI. Sementara Putri (2018), berpendapat persaingan ini disebabkan oleh geopolitik, ia tidak menampik bahwa konflik Syiah-Sunni menjadi pemicunya. Pada intinya, konflik Saudi-Iran disebabkan oleh kepentingan politik masing-masing pihak: keinginan Arab Saudi untuk menjadi kekuasaan tertinggi dan tunggal, yang ditolak Iran sebagai negara *theo-democracy*, diperparah dengan konflik Syiah-Sunni.

Turki, sebagai negara demokrasi sekuler, juga menginginkan pengaruh kuat di OKI. Bagis & Yurtseven (2017) melihat potensi Turki membawa OKI menuju persatuan supranasional antaranggota melalui kerja sama ekonomi dan kebijakan. Dengan merangkul latar belakang politik berbeda, Turki menunjukkan potensi bagi praktik demokrasi di OKI. Namun, sejauh ini, Turki tidak memiliki ambisi untuk membentuk OKI menjadi negara demokrasi seperti Arab Saudi atau Iran. Kepentingan Turki lebih condong pada penguatan *soft power* dalam sektor pariwisata (Zamani-Farahani & Eid, 2016) serta pengembangan energi terbarukan (Kumar & Jan, 2014)

Terkait indikator Kesetaraan Antarnegara, persaingan antara Arab Saudi, Iran, dan Turki ini menunjukkan bahwa OKI belum sepenuhnya mewujudkan prinsip kesetaraan partisipasi dan ketiadaan otoritas tunggal. Meskipun kosmopolitanisme demokrasi, menurut Heywood (2014) dirumuskan untuk menjadikan institusi global demokratis tanpa memandang sistem politik negara anggota, benturan budaya dan sektarianisme yang dibawa oleh Arab Saudi dan Iran telah menghambat OKI menjadi mediator yang efektif. Hal ini menciptakan kubu politik di dalam institusi, di mana setiap

kubu berusaha memprioritaskan kepentingannya yang saling berseberangan.

Meskipun menghadapi tantangan dalam demokrasi politik, OKI aktif mengembangkan demokrasi ekonomi. OKI memiliki beberapa lembaga pengembang kerja sama ekonomi, seperti Islamic Development Bank (IDB) Group, Islamic Center for Development of Trade (ICTD), Organization of the Islamic Ship-Owner Association (OISA), Islamic Chamber for Commerce and Industry (ICCI), dan Statistical, Economic and Social Research and Training Center for Islamic Countries (SERTFIC). Lembaga-lembaga ini menjadi langkah awal menuju keadilan global dan demokratisasi institusi global. Semua anggota OKI diberikan kesempatan dan kemudahan untuk mengembangkan perekonomiannya sesuai potensi. Contohnya, kerja sama sektor pariwisata antara Turki, Malaysia, Lebanon, Suriah, Uni Emirat Arab, Mesir, Bahrain, dan Indonesia untuk menarik turis dari Amerika, Eropa, dan Asia Timur, serta wisata religi di Arab Saudi dan Iran-Irak (Zamani-Farahani & Eid, 2016). Ada pula proyek pengembangan energi terbarukan antara Turki dan Malaysia (Guessoum & Osama, 2015). Kebebasan ini pada akhirnya dapat mengurangi ketegangan politik di OKI, sejalan dengan pandangan Slesman (2015),

bahwa konflik politik dan agama di OKI disebabkan lemahnya lembaga ekonomi. Namun, perlu dicatat bahwa pengaruh lembaga ekonomi yang kuat tidak optimal jika secara politik negara anggota OKI masih lemah (tidak demokratis), karena hasil pemanfaatan fasilitas ekonomi tetap dipengaruhi oleh kemampuan dan struktur politik internal setiap negara anggota.

Hibrida Budaya di OKI

Salah satu tantangan utama dalam kosmopolitanisme demokrasi adalah manajemen partisipasi politik global oleh individu serta pengelolaan keberagaman budaya yang dibawa oleh masing-masing aktor. Bagi kelompok identitas, kosmopolitanisme dihadapkan pada potensi benturan budaya. Oleh karena itu, kosmopolitanisme demokrasi seharusnya berfungsi sebagai wadah mediasi bagi berbagai kepentingan budaya (Delanty, 2011). Pada tingkat global, mediasi yang paling potensial adalah mengarah pada hibrida budaya sebagai upaya untuk menciptakan kosmopolitanisme demokrasi. Hibrida budaya mengacu pada percampuran dan adaptasi elemen-elemen budaya yang berbeda, menghasilkan bentuk-bentuk baru yang inklusif dan saling menghargai.

Terkait hibrida budaya, Guessoum dan Osama (2015) menyoroti keterbelakangan pendidikan di negara anggota OKI pada 2012. Universitas di negara anggota OKI (menampung 25% penduduk dunia) hanya berkontribusi 1,6% paten penemuan, 6% publikasi akademis, dan 2,4% penelitian global. Hanya ada tiga peraih Nobel sains dari OKI, dan hanya 12 universitas di atas peringkat 400 dunia. Fenomena ini direspons dengan adopsi kurikulum Amerika di beberapa universitas di Timur Tengah, seperti Bogazici University (Turki), American University of Beirut (Lebanon), dan American University in Cairo (Mesir). Pendidikan gaya Amerika ini, berlandaskan kebebasan dan multikulturalisme, diharapkan membentuk pola pikir kosmopolitan dan transnasional pada lulusannya (Altan-Olcay 2008) mendorong inovasi kewarganegaraan global, dan memadukan budaya politik Amerika dengan lokal (Rupp, 2009; Frayha, 2012; Smail & Silvera, 2018).

Peningkatan jumlah lulusan universitas Amerika di Timur Tengah dengan pola pikir liberal berpengaruh pada kesadaran demokrasi politik, terutama saat mereka menduduki posisi penting di masyarakat (Hubbard, 2017). Gerakan liberalisasi, seperti *woman to drive* di Arab Saudi yang

dipelopori Aisha al-Maneh (lulusan University of Colorado), berdampak pada modernisasi Arab Saudi (pencabutan larangan mengemudi perempuan pada 2017). Namun, demokratisasi di Arab Saudi masih sulit, dengan pemerintah mempertahankan otokrasi meskipun ada upaya reformasi (Yom, 2005) dan tuntutan dari partai pro-demokrasi seperti National Assembly Party (NAAS) yang anggotanya berlatar belakang pendidikan Barat (Yaakoubi, 2020; al-Rasheed & Alaoudh, 2020; Gunadha & Apriadi, 2020).

Di Mesir, popularitas universitas Amerika juga memengaruhi revolusi politik, di mana mahasiswa American University in Cairo (AUC) menjadi pelopor gerakan menuntut kebebasan dan demokrasi sejak 2011 (Anderson, 2011; Mady, 2016). Selain itu, internet berperan penting dalam penyebaran nilai demokrasi dan kesadaran partisipasi sipil di negara mayoritas Muslim (Hosteich, 2005; Gainous & Wagner, 2014; Ahmed & Cho, 2019).

Memasuki tahun 2020-an, terdapat revolusi berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan HAM di tingkat regional. OKI tercatat telah melakukan resolusi perlindungan komunitas minoritas Muslim yang berada di negara bukan anggota OKI. Tercantum dalam Resolusi OKI tahun 2020

No 1/36-MM tentang pengamanan hak-hak masyarakat Muslim dan Minoritas di negara bukan anggota, OKI menegaskan kembali komitmennya sebagai parlemen Muslim global. Komunitas muslim sebagai minoritas didengarkan suaranya dalam OKI yang kemudian direspons dengan bentuk bantuan resolusi konflik dengan tetap memperhatikan kedaulatan negara mereka berasal. LSM Islam, negara anggota, kooperasi di bawah naungan OKI mendapatkan mandat untuk bersatu memberikan bantuan dengan koordinasi Sekretaris Jenderal OKI (OIC, 2020). Berikutnya, OKI berusaha untuk mewakili suara bagi isu muslim minoritas dan komunitas muslim global. Seperti dalam penistaan Nabi Muhammad di Prancis, OKI mengancam tindakan Prancis serta pelaku penistaan (OIC, 2020). Isu ini kemudian menjadi salah satu alasan topik pembahasan dari tahun 2020-2022 dalam OKI untuk memerangi Islamophobia di negara minoritas Muslim, di antaranya India, Inggris, Amerika, Prancis dan Kanada (OIC, 2020). Diskusi tersebut menganalisis langkah yang tepat untuk mengurangi pemikiran Islamophobia bagi komunitas minoritas Muslim sebagai korban secara langsung.

Dalam *The OKI-2025 Programme of Action* juga terdapat beberapa reformasi yang dilakukan oleh organisasi. Tujuan dari

program aksi adalah sebagai upaya OKI untuk semakin terbuka dengan aspirasi Muslim secara global, terlepas mereka berasal dari negara anggota atau bukan. OKI juga berusaha untuk meminimalisasi benturan kepentingan komunitas budaya dengan membentuk King Abdullah bin Abdelaziz International Centre for Interreligious and Intercultural Dialogue (KAICIID) sebagai media dialog antar komunitas antara agama dan budaya. Isu *human security* juga mulai diangkat dalam sidang parlemen OKI (OIC, 2016). Seperti pemberdayaan perempuan yang menjadi isu utama dalam konferensi OKI pada tanggal 20 November-1 Desember 2018 (OIC, 2018). Bagi Delanty (2011), ini adalah indikasi hibrida budaya di luar kebudayaan Timur Tengah sendiri, dilihat dari adanya kesadaran tentang isu feminisme dan Islamofobia, serta pembentukan KAICIID sebagai awal adaptasi terhadap perbedaan budaya yang sering menjadi konflik politik di OKI.

Pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) Individu di OKI

Kekuatan politik yang tidak stabil di sebagian besar negara Muslim menjadi permasalahan utama dalam pelaksanaan HAM individu di tingkat institusi

internasional. Laporan United States Institute of Peace (Kuba, Khan, Manshipoori, & Hicks, 2002) menyebutkan hal ini disebabkan oleh budaya politik otoriter dan patriarki yang menolak globalisasi serta pengakuan HAM karena dianggap hegemoni Barat. Namun, kondisi ini berkembang. Pada 2012, kesadaran demokrasi di masyarakat sipil beberapa negara Asia Barat dan mayoritas Muslim meningkat. Survei menunjukkan antusiasme demokrasi di Lebanon (2011: 81%, 2012: 84%) dan Turki (66% menjadi 71% pada 2021). Mesir (67%), Tunisia (63%), Yordania (61%), dan Pakistan (42%) juga menunjukkan keinginan untuk sistem demokrasi seperti pemilu dan kebebasan berpendapat. Namun, dukungan terhadap demokrasi di Mesir, Tunisia, Yordania, dan Pakistan menurun dari 2011 ke 2012, karena masyarakat lebih memilih ekonomi kuat daripada pemerintahan demokrasi (Kohut et al., 2012)

Meskipun mengalami penurunan dukungan HAM di negaranya, Mesir dan Tunisia dianggap (Rumman et al., 2018) berhasil melakukan revolusi untuk membebaskan diri dari hegemoni politik Arab Saudi, menginspirasi Yaman, Suriah, dan Libya. Rumnan (2018) menilai ini menaikkan ekspektasi atas kelahiran

demokrasi di dunia Arab. Namun, pada 2019, negara Muslim seperti Bosnia dan Herzegovina (8.04) serta Albania (8.01) menunjukkan tingkat kebebasan pribadi setara negara Eropa, jauh di atas rata-rata dunia (6.98). Meskipun masyarakatnya sadar demokrasi, Mesir, Suriah, dan Turki masih memiliki tingkat kebebasan pribadi yang rendah karena sistem politik otoriter, hukum yang tidak berpihak pada rakyat, dan aparat keamanan yang represif (Akyol, 2020). Ini menunjukkan bahwa demokrasi di dunia Muslim masih jauh dari praktik Eropa, menghadapi dilema transisi dari teokrasi ke demokrasi yang sebatas pemilu tanpa diikuti nilai demokrasi lainnya seperti kebebasan berpendapat dan partisipasi rakyat dalam pembentukan kebijakan. Roy (2012) menggambarkan transisi ini seperti Gereja Katolik Roma yang menerima lembaga demokrasi namun tetap oligarki dalam praktik. Kasus Turki di bawah Erdogan (Bechev, 2022) menunjukkan upaya adaptasi demokrasi Islam yang justru melemahkan demokrasi, dibuktikan dengan kebijakan represif terhadap oposisi dan jurnalis (Freedom House, 2021).

Meskipun demikian, terkait indikator Pelaksanaan HAM Individu, OKI masih belum menunjukkan pemenuhan hak dasar individu dari negara anggota dalam lingkup

regional sebagai hak berpolitik (Heywood, 2014; Caney, 2013). Negara anggota masih menghadapi tantangan adaptasi dengan desakan demokratisasi politik dan pemenuhan hak sipil dari masyarakat.

Keterbatasan Praktik Kosmopolitanisme Demokrasi dalam OKI

Bagian ini menyintesis temuan-temuan dari analisis terhadap Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) melalui lensa kosmopolitanisme demokrasi, dengan fokus pada indikator kesetaraan antar-negara, hibrida budaya, dan pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM). Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun OKI memiliki potensi dan telah mengambil beberapa langkah menuju karakteristik kosmopolitan demokratik, organisasi ini masih menghadapi hambatan signifikan yang mencegahnya mencapai status tersebut secara penuh.

Dari perspektif Kesetaraan Antar-Negara, analisis menunjukkan bahwa OKI masih sangat didominasi oleh persaingan pengaruh dan kepentingan politik negara-negara besar seperti Arab Saudi, Iran, dan Turki. Upaya hegemoni Arab Saudi dengan sistem teokrasi monarkinya, yang kemudian dilawan oleh Iran dengan *theo-democracy*-nya, mencerminkan adanya ketidaksetaraan

kekuasaan yang menghambat partisipasi setara semua anggota. Meskipun Turki berusaha merangkul keberagaman politik, ambisinya yang lebih condong pada *soft power* ekonomi daripada reformasi demokrasi OKI secara menyeluruh, belum cukup untuk mengikis dominasi tersebut. Fenomena ini menegaskan bahwa meskipun kosmopolitanisme demokrasi menghendaki institusi global bertindak demokratis tanpa memandang sistem politik domestik anggotanya, realitas geopolitik dan sektarianisme di Timur Tengah justru menciptakan kubu-kubu politik yang memprioritaskan kepentingan sempit di atas kesetaraan institusional. Oleh karena itu, prinsip kesetaraan partisipasi sebagai fondasi kosmopolitanisme demokrasi belum terwujud sepenuhnya di dalam OKI.

Dalam hal Hibrida Budaya, temuan menunjukkan adanya dilema. Di satu sisi, OKI belum sepenuhnya berhasil menjadi mediator efektif dalam menghadapi benturan budaya dan sektarianisme (terutama antara Sunni dan Syiah) yang dibawa oleh negara-negara anggotanya. Konflik ideologis ini terus memicu ketegangan dan menghambat konsensus yang inklusif. Di sisi lain, terdapat indikasi awal menuju hibrida budaya yang positif melalui peningkatan kesadaran akan

isu global seperti feminisme dan Islamofobia, serta pembentukan King Abdullah bin Abdelaziz International Centre for Interreligious and Intercultural Dialogue (KAICIID). Selain itu, tren adopsi kurikulum pendidikan Barat (khususnya Amerika) di universitas-universitas negara anggota OKI, serta pemanfaatan internet, telah memicu peningkatan kesadaran demokrasi dan pola pikir liberal di kalangan masyarakat sipil. Namun, dampaknya terhadap institusi OKI itu sendiri masih terbatas, lebih banyak terlihat pada level sosial-politik domestik negara anggota daripada transformasi budaya institusional OKI secara keseluruhan. Artinya, meskipun ada indikasi percampuran budaya di tingkat masyarakat, hal itu belum secara signifikan memengaruhi struktur pengambilan keputusan atau norma-norma internal OKI.

Adapun pada indikator Pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) individu, meskipun terdapat peningkatan kesadaran demokrasi di masyarakat sipil beberapa negara anggota OKI, hal ini sering kali tidak berkorelasi linier dengan peningkatan kebebasan sipil atau demokratisasi sistem politik secara substantif. Transisi yang terjadi kerap hanya sebatas pemilihan umum tanpa diikuti oleh nilai demokrasi esensial seperti

kebebasan berpendapat dan partisipasi rakyat dalam pembentukan kebijakan. Bahkan, negara-negara dengan kesadaran demokrasi tinggi seperti Turki masih menunjukkan tingkat kebebasan pribadi yang rendah akibat sistem otoriter. Namun demikian, OKI sebagai institusi telah menunjukkan komitmen awal dalam perlindungan HAM, terutama terkait komunitas Muslim minoritas di negara non-anggota dan penanganan isu Islamofobia melalui resolusi dan program aksi (OIC-2025 Programme of Action). Ini menunjukkan adanya evolusi mandat OKI untuk mencakup isu *human security* dan pemberdayaan perempuan. Akan tetapi, upaya ini masih terfokus pada perlindungan kolektif (komunitas Muslim) dan belum secara kuat menginternalisasi hak-hak individu secara universal dalam lingkup internal negara anggota, terutama di hadapan tantangan budaya politik otoriter dan patriarki yang masih mengakar.

Secara keseluruhan, analisis ini membuktikan argumen awal bahwa OKI baru memunculkan unsur-unsur praktik demokrasi seperti keterbukaan pada isu sosial kaum Muslim dan kesetaraan dalam partisipasi kegiatan ekonomi. Upaya OKI dalam memfasilitasi kerja sama ekonomi dan mulai menyinggung isu HAM global merupakan langkah awal yang positif.

Namun, penelitian ini juga menggarisbawahi bahwa OKI masih jauh dari mencapai status entitas kosmopolitan demokratik sepenuhnya. Hegemoni tunggal (terutama dari Arab Saudi dan persaingan kekuasaan regional) dan kurangnya kemampuan OKI sebagai mediator efektif dalam menghadapi benturan budaya internal (sektarianisme) tetap menjadi hambatan fundamental.

Temuan penelitian ini menjadi kritik bagi konsep kosmopolitanisme demokrasi dalam pemerintahan multi-level. Meskipun konsep tersebut mengidealkan tata kelola global yang demokratis dan inklusif, realitas di OKI menunjukkan bahwa negara tetap bergerak berdasarkan kekuasaan dan kepentingan nasionalnya. Organisasi regional, meskipun berpotensi mendukung demokrasi global, dapat pula menjadi wadah bagi persaingan geopolitik dan sektarianisme yang menghambat internalisasi nilai-nilai demokrasi universal. Ini menyoroti bahwa transisi menuju kosmopolitanisme demokrasi pada organisasi yang berakar pada identitas partikular (seperti Islam) memerlukan strategi yang lebih canggih untuk mengatasi vested interest dan dinamika kekuasaan internal anggotanya.

SIMPULAN

Penelitian ini menganalisis Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) melalui lensa kosmopolitanisme demokrasi, dengan fokus pada indikator kesetaraan antar-negara, hibrida budaya, dan pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) individu. Temuan menunjukkan bahwa prospek OKI sebagai entitas kosmopolitan demokratik masih menghadapi tantangan signifikan, meskipun ada indikasi potensi pada aspek-aspek tertentu.

Pada dimensi Kesetaraan Antar-negara, OKI masih bergulat dengan dinamika hegemoni dan persaingan kekuasaan antara negara-negara besar seperti Arab Saudi dan Iran. Konflik kepentingan politik dan sektarianisme ini secara substansial menghambat prinsip kesetaraan partisipasi yang menjadi inti kosmopolitanisme demokrasi.

Dalam hal Hibrida Budaya, OKI menunjukkan kemajuan selektif. Meskipun organisasi ini belum sepenuhnya mampu menjadi mediator efektif bagi benturan budaya dan sektarianisme internal, terdapat upaya seperti pembentukan KAICIID dan peningkatan kesadaran akan isu global (misalnya feminisme dan Islamofobia). Tren adopsi kurikulum pendidikan Barat dan pemanfaatan internet di negara anggota juga

berkontribusi pada pengembangan pola pikir yang lebih terbuka dan potensi hibrida budaya di tingkat masyarakat, meskipun dampaknya pada struktur institusional OKI masih terbatas.

Adapun pada Pelaksanaan HAM Individu, OKI menunjukkan pola implementasi yang selektif. Organisasi ini telah memperlihatkan komitmen dalam perlindungan komunitas Muslim minoritas dan upaya memerangi Islamofobia, serta mulai mengangkat isu *human security* dan pemberdayaan perempuan. Namun, di tingkat negara anggota, hak partisipasi politik individu masih sering kali dibatasi, menunjukkan adanya preferensi OKI untuk mendukung hak-hak yang tidak mengancam stabilitas kekuasaan negara anggota, sementara hak-hak sipil substantif masih menjadi tantangan.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa OKI, sebagai organisasi regional, masih sangat ketat dalam upaya demokratisasi politik internal akibat dinamika kekuasaan dan kepentingan. Sebaliknya, OKI menunjukkan keterbukaan dan langkah awal yang lebih hati-hati dalam mengembangkan demokrasi ekonomi, serta mengadopsi isu-isu sosial dan budaya yang berkaitan dengan HAM tertentu. Ini

menggarisbawahi bahwa transisi OKI menuju entitas kosmopolitan demokratik adalah proses yang kompleks, ditandai oleh kontradiksi antara idealisme universal dan realitas geopolitik serta identitas partikular anggotanya.

REFERENSI

- Abdillah, M. (2017, Agustus 31). *Model Demokrasi di Negara Muslim*. Diambil kembali dari Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: <https://graduate.uinjkt.ac.id/id/model-demokrasi-di-negara-muslim>
- Akyol, M. (2020, Agustus 25). *Freedom in the Muslim World. Economic Development Bulletin, Center for Global Liberty and Prosperity*. Diambil kembali dari CATO Institute: <https://www.cato.org/economic-development-bulletin/freedom-muslim-world>
- al-Rasheed, M. (2020, September 25). *A Vision for a Democratic Saudi Arabia Free from the House of Saud*. Diambil kembali dari Midle East Eye: <https://www.middleeasteye.net/opinion/future-saudi-arabia-should-not-be-left-hands-house-saud>
- al-Rasheed, M., & Alaoudh, A. (2020, Oktober 1). *It's Time for Democratic Change in Saudi Arabia*. Diambil kembali dari the Washington Post: <https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/09/29/its-time-democratic-change-saudi-arabia/>
- Anderson, L. (2011, Maret 27). *How Egypt's Revolution Looked From the American University in Cairo*. (J. Miller, Pewawancara) Diambil kembali dari <https://www.theatlantic.com/international/archive/2011/03/how-egypts-revolution-looked-from-the-american-university>
- Bagis, B., & Yurtseven, C. (2017). *Turkey and the OIC: Greater Economic Cooperation, Opportunities and Challenges*. Turkey: Center of Strategic Research. Diambil kembali dari https://mpira.ub.uni-muenchen.de/84049/1/MPRA_paper_84049.pdf
- Bechev, D. (2022, Februari 22). *Turkey Under Erdoğan: How a Country Turned from Democracy and the West*. Diambil kembali dari Carnegie Endowment: <https://carnegieendowment.org/research/2022/02/turkey-under-erdogan-how-a-country-turned-from-democracy-and-the-west?lang=en¢er=europe>
- DJ, Y. (2017). Negara Hukum yang Demokratis Menurut Konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945). *Menara Ilmu*, 12(1), 193-200. doi:<https://doi.org/10.33559/mi.v12i1.502>
- Egypt Independent. (2021, Juni 3). *Number of Egyptian students in the US increases 76% in 10 years: Erudera*. Diambil kembali dari Egypt Independent: <https://cloudflare.egyptindependent.com/number-of-egyptian-students-in->

- the-us-increases-76-in-10-years-erudera/
- Freedom House. (2021). *Freedom in The World 2021*. Diambil kembali dari Freedom House: <https://freedomhouse.org/country/turkey/freedom-world/2021>
- Gainous, J., & Wagner, K. M. (2014). MENA and the internet : technology and the democratic divide. *ThinkIR: The University of Louisville ersity of Louisville's Institutional Reposit s Institutional Repository*, 2-26. Diambil kembali dari <https://ir.library.louisville.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1030&context=faculty>
- Guessoum, N., & Osama, A. (2015). *Revive Universities of the Muslim World*. Macmillan Publisher. Diambil kembali dari <https://islam-science.net/wp-content/uploads/2015/11/Institutions-Revive-universities-of-the-Muslim-world.pdf>
- Gunadha, R., & Apriadi, A. (2020, September 24). *Perjuangkan Demokrasi, Pemberontak Arab Saudi Bentuk Partai Oposisi*. Diambil kembali dari suara.com: <https://www.suara.com/news/2020/09/24/185946/perjuangkan-demokrasi-pemberontak-arab-saudi-bentuk-partai-oposisi?page=2>
- Heywood, A. (2014). *Global Politics*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Hosteich, A. (2005). The Internet in the Arab World: Playground for Political Liberalization. *IR - International Relations*, 78-96. Diambil kembali dari <https://library.fes.de/pdf-files/id/ipg/02941.pdf>
- Hubbard, B. (2017, Oktober 7). *Once Shunned as Drivers, Saudi Women Fought Ban Now Celebrate*. Diambil kembali dari New York Times: <https://www.nytimes.com/2017/10/07/world/middleeast/saudi-arabia-women-driving-ban.html>
- Ihsanoglu, E. (2010, September 30). The OIC on Democracy and Human Rights. (T. Johnson, Pewawancara) Diambil kembali dari <https://www.cfr.org/interview/oic-democracy-and-human-rights>
- Izan, M., & Zain, M. (2019). Freedom and Self-Governance in Islamic Discourse on Democracy. *International Journal of West Asian Studies*, 11(1), 19-26. Diambil kembali dari <http://journalarticle.ukm.my/17087/1/36885-116348-1-SM%20%281%29.pdf>
- Khaldun, S. A.-A. (2011). *Muqaddimah Ibnu Khaldun*. (M. Irfham, & M. Supar, Penerj.) Jakarta Timur: Pustaka Pelajar.
- Kuba, L., Khan, M., Manshipoori, M., & Hicks, N. (2002). *Islam and Democracy*. United State Institute of Peace. Diambil kembali dari <https://www.usip.org/sites/default/files/sr93.pdf>

- Küçükaşcı, E. Ş. (2019). *Saudi Arabia under Muhammad bin Salman : Crisis, Reform or Stagnation*. Istanbul: TRT World Research Centre. Diambil kembali dari <https://researchcentre.trtworld.com/wp-content/uploads/2020/11/Saudi-Arabia-Crisis-Reform-Stagnation.pdf>
- Kuru, A. (2021). *The Ulema-State Alliance : A Barrier to Democracy and Development in the Muslim World*. Tony Blair Institute for Global Change. Diambil kembali dari <https://assets.ctfassets.net/75ila1cntaeh/28i2zgkxhdutXDADfkBhD0/1ca5c555fdab600208afdd7dd56835c4/The-Ulema-State-Alliance-A-Barrier-to-Democracy-and-Development-in-the-Muslim-World.pdf>
- McGrew, A. (2020). Globalization and Global Politic. Dalam J. Baylis, S. Smith, & P. Owens, *The Globalization of World Politics* (Eighth Edition ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches*. Pearson: ASA.
- OIC. (2016). *The OIC - 2025 Programme of Action*. Diambil kembali dari Organization of Islamic Cooperation (OIC): <https://www.sesric.org/files/oic-2025-programme-of-action.pdf>
- OIC. (2017). *History*. Diambil kembali dari Organisation of Islamic Cooperation: https://www.oic-oci.org/page/?p_id=52&p_ref=26&lan=en
- OIC. (2018). *Seventh Islamic Ministerial Conference on Women's Role in Driving Development for the OIC Member States*. Ouagadougou, Burkina Faso: Organizations of Islamic Cooperation. Diambil kembali dari <https://www.oic-oci.org/docdown/?docID=4425&refID=1249>
- OIC. (2020, Oktober 23). Diambil kembali dari Twitter: https://twitter.com/oic_oci/status/1319633192756850689?lang=en
- OIC. (2020). *Resolutions on Muslim Communities and Muslim Minorities in The Non-OIC Member States*. Diambil kembali dari Organization of Islamic Cooperation: <https://www.oic-oci.org/docdown/?docID=6631&refID=3255>
- OIC. (2022). *Fourteenth OIC Report on Islamophobia December 2020 - January 2022*. Islamabad: Organization of Islamic Cooperations. Diambil kembali dari https://www.oic-oci.org/upload/islamophobia/2022/14th_Annual_Report_on_Islamophobia_March_2022_r2.pdf
- Putri, G. E. (2018). Upaya Arab Saudi terhadap Organisasi Kerja Sama Islam dalam Menyelesaikan Konflik Iran dan Arab Saudi Tahun 2013 - 2018. *Dauliyah Journal*, 2, 249-283. doi: <https://doi.org/10.21111/dauliyah.v3i2.2504>
- Roy, O. (2012, Mei 1). *Islam : the Democracy Dilemma*. Diambil kembali dari Wilson Center:

- <https://www.wilsoncenter.org/article/islam-the-democracy-dilemma>
- Rumman, M. A., Anani, K., Bondokji, N., Hanieh, H. A., al-Haj, A., Aljeri, M., . . . al-Qudah, G. (2018). *The Prospect of Political Islam in Troubled Region*. Irak: Friedrich Elbert Stiftung. Diambil kembali dari <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/amman/14224.pdf>
- Rupp, R. (2009). Higher Education in the Middle East: Opportunities and Challenges for U.S. Universities and Middle East Partners. *Global Media Journal*, 8(24), 1-24. Diambil kembali dari <https://www.globalmediajournal.com/archive/gmj-volume-8-issue-14-year-2009.html>
- The Economist Intelligence Unit. (2020). *Democracy Index 2019 : A year of democratic seatbacks and popular protest*. Diambil kembali dari <https://www.in.gr/wp-content/uploads/2020/01/Democracy-Index-2019.pdf>
- Uni Rank. (2025). *Top Universities in Egypt, 2025 Egyptian University Ranking*. Diambil kembali dari Uni Rank: <https://www.unirank.org/eg/ranking/>
- Yaakoubi, A. E. (2020, September 24). *Saudi Dissidents form Pro-Democracy Political Group*. Diambil kembali dari Reuters: <https://www.reuters.com/article/saudi-politics-dissidents-idINKCN26E32X/>
- Yogatama, A. R., & Hastiadi, F. F. (2015). The Role of Democracy and Governance in the Enhancement of Indonesian Exports to the Organization of the Islamic Cooperation (OIC) Countries. *Working Papers in Economics and Business* 201504. Diambil kembali dari <https://ideas.repec.org/p/lpe/wpecbs/201504.html>
- Yom, S. L. (2005). Civil Society and Democratization in the Arab World. *Middle East Review of International Affairs*, 9(4), 14-33. Diambil kembali dari https://ciaotest.cc.columbia.edu/olj/meria/meria_dec05/Yom.pdf